

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2026 merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Penyusunan laporan ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi perwujudan komitmen DJPRL terhadap prinsip *Good Governance*. Pengukuran kinerja DJPRL dilakukan secara transparan dan *real-time* melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman kinerjaku.kkp.go.id dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) dijabarkan ke dalam dua Sasaran Program (SP) utama yang diukur melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: **SP.1: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir** Sasaran ini fokus pada mandat utama organisasi dalam menata ruang laut secara nasional yang diukur melalui lima indikator: (1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%); (2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%); (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000); (4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks); dan (5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai). **SP.2: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut** Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan internal dan reformasi birokrasi, yang diukur melalui satu indikator (6) Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai).

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, DJPRL mencatatkan performa yang sangat luar biasa dengan fokus pencapaian ini bertumpu pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) yang menjadi satu-satunya indikator dengan target triwulan dari 6 Indikator di Tahun 2026. Indikator ini berhasil terealisasi sebesar Rp267.674.294,462 dari target sebesar Rp50.000.000 dengan persentase capaian sebesar 120% (batas maksimal Kinerjaku). Meskipun indikator kinerja lainnya bersifat tahunan (*annual*) dan masih dalam tahap proses pelaksanaan, capaian pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini mendorong Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026 menyentuh angka 120% dengan predikat "Istimewa".

Pada tahun 2026 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 199.960.342.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp179.960.342.000,- dan PHLN Rp 20.000.000.000,- Anggaran tersebut dialokasikan pada 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) Pusat,

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2006. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp24.982.474.000,- yang terdiri dari blokir Rupiah murni sebesar Rp4.982.474.000,- dan blokir PHLN sebesar Rp20.000.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp174.977.868.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL pada Triwulan I mencapai Rp18.872.376.828,- atau sebesar 10,79% dari total pagu anggaran efektif, rincian tercantum pada tabel berikut:



Gambar 1 Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2026

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu: Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu secara umum: (1) keterbatasan regulasi teknis (NSPK) terkait mekanisme peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) dan penyusunan RZ KSN; (2) optimalisasi infrastruktur digital (E-sea) dengan menambahkan akun E-Sea untuk lingkup UPT; dan (3) masih rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian laporan tahunan. Upaya peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan DJPRL ke depan adalah: (1) Penyusunan NSPK peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSN; (2) Pembuatan Akun E-Sea UPT sebagai Tim Penilai Laporan Tahunan; dan (3) Melakukan Asistensi Penyampaian Laporan Tahunan Lingkup KKP.